

---

## DARI URBANISASI KE RURALISASI

### FROM URBANIZATION TO RURALIZATION

**Ari Sulistyorini**

PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta, Jl. Melati Kulon No. 1 Baciro 55225  
arisulis@outlook.com

#### ABSTRAK

*Urbanisasi merupakan masalah serius bagi Indonesia. Jakarta adalah episentrum urbanisasi, yang menjadi pusat kekayaan, yang menyedot migrasi penduduk dari desa yang menciptakan kepadatan penduduk, ketimpangan sosial, sekaligus kemacetan dan banjir. Presiden Joko Widodo berupaya membendung urbanisasi sebagai bagian dari platform Indonesia centris, sebaliknya Menteri Keuangan Sri Mulyani berupaya memacu urbanisasi untuk pertumbuhan ekonomi. Artikel ini bertujuan menyampaikan kritik terhadap urbanisme-urbanisasi, sekaligus menawarkan ruralisasi, yang bergerak kembali ke per(des)aan, dengan agrikultur sebagai tulang punggung, sekaligus kabupaten, desa, petani, nelayan, dan peternak sebagai aktor utama. Artikel ini tidak bekerja dengan geografi, demografi, maupun ekonomi, tetapi dengan ilmu politik, yang menggunakan metode interpretif dan analisis kritis. Dengan analisis itu, studi gagasan ini secara kritis menemukan bahwa urbanisasi telah menciptakan Indonesia sebagai masyarakat perkotaan yang kompleks secara ekonomi, sosial dan politik. Urbanisasi ini telah memberi kekayaan dan kemegahan kota, tetapi juga menyajikan paradoks serius: pembusukan kota (ledakan kedalam/implosi), dan pemiskinan desa (ledakan keluar/eksplosi). Solusi "kota centris" dengan resep kota berkelanjutan hanya akan menangani pembusukan kota tetapi mengabaikan pemiskinan desa. Solusi "Indonesia centris" dengan ruralisasi di kabupaten dan desa, dengan emansipasi lokal, merupakan jawaban lebih baik untuk pemerataan, keadilan dan kemakmuran. Jepara, kabupaten paling makmur di Jawa Tengah, merupakan contoh ruralisasi yang melampaui pendekatan proyek dari atas.*

**Kata kunci:** urbanisasi, ruralisasi, kota, desa

#### ABSTRACT

*Urbanization is a serious problem for Indonesia. Jakarta is the epicenter of urbanization, which is the center of wealth, which sucks in the migration of people from villages that creates population density, social inequality, as well as congestion and flooding. President Joko Widodo seeks to stem urbanization as part of an Indonesia centric platform, while Minister of Finance Sri Mulyani seeks to spur urbanization for economic growth. This article aims to express criticism of urbanism, as well as offering ruralization, which moves back to rural, with agriculture as the backbone, as well as districts, villages, farmers, fishermen, and farmers as the main actors. This article does not work with geography, demography, or economics, but with political science, which uses interpretive methods and critical analysis. With this analysis, this study of ideas critically finds that urbanization has created Indonesia as an economically, socially and politically complex urban society. This urbanization has given the wealth and splendor of the city, but also presents a serious paradox: city decay (explosion into / implosion), and rural impoverishment (explosion out / explosion). A "city-centric" solution with a sustainable city recipe will only deal with urban decay but ignore rural impoverishment. The "Indonesia centric" solution with rural and rural areas, with local emancipation, is a better answer for equality, justice and prosperity. Jepara, the most prosperous district in Central Java, is an example of ruralization that goes beyond the project approach from above.*

**Keywords:** urbanization, ruralization, city, village.

## PENDAHULUAN

Ketika meluncurkan dana desa pertama kali tahun 2015, Presiden Joko Widodo mempunyai harapan besar agar dana bisa menjadi energi untuk memperbaiki infrastruktur dan ekonomi desa, menurunkan kemiskinan, dan menekan laju urbanisasi atau migrasi penduduk dari desa ke kota (Liputan 6, 22 Juli 2015). Arah dan harapan yang terus disampaikan Presiden dari tahun ke tahun ini, tentu menjadi bagian dari *platform* yang mengubah “Jawa centris” dan “Jakarta centris” menuju “Indonesia centris” yang lebih merata, yang *platform* itu menjadi bagian dari Nawacita ketiga: “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”. Dana desa tentu bukan satu-satunya instrumen fiskal pemerintah untuk mendukung *platform* besar baru itu, tetapi juga proyek infrastruktur di setiap daerah pelosok dan pinggiran, yang selama ini diabaikan oleh pemerintah.

Belakangan, pada bulan April 2020, Presiden juga menyampaikan perbedaan makna antara “mudik” dan “pulang kampung”. Warganet maupun ahli bahasa mengkritik, bahkan menyalahkan Presiden, sebab menurut tata bahasa, kata mudik dan pulang kampung, mempunyai kesamaan makna. Tetapi penulis memahami bahwa ungkapan Presiden adalah naluri pemimpin, yang sedang menggunakan politik bahasa untuk memberi makna yang lebih dalam tentang mudik dan pulang kampung. Namun para teknokrat dan ahli tidak menjabarkannya dengan baik. Bagi penulis, hilir-mudik terkait dengan urbanisasi, dan pulang kampung mempunyai makna ruralisasi.

Urbanisasi – dalam pengertian perpindahan penduduk dari desa ke kota – merupakan isu dan fakta penting di mata Presiden dan tentu juga para penganut “Indonesia centris” dan para pembela desa. Tetapi cita-cita besar ini masih jauh. Data statistik menunjukkan bahwa laju urbanisasi terus bertambah. Pada tahun 2008, penduduk yang menghuni perkotaan sejumlah 48,34% dan meningkat menjadi 55,33% pada tahun 2018. Dengan demikian penduduk kota lebih besar ketimbang penduduk desa. Fakta ini meruntuhkan mitos “lebih dari 70% penduduk Indonesia tinggal di desa” sebagaimana kerap disampaikan oleh para kepala desa ketika

mereka melakukan advokasi menuntut perhatian pemerintah kepada desa.

Segaris dengan data itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tahun 2017, dengan menggunakan data Bank Dunia, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan urbanisasi Indonesia terbesar di Asia, yakni sebesar 4,1%. Angka tersebut lebih tinggi daripada pertumbuhan urbanisasi di Tiongkok yang sebesar 3,8% dan India 3,1%. Agak berbeda dengan harapan Presiden, Menkeu berujar “Indonesia sendiri mengharapkan ada 68% penduduk dari populasi yang akan tinggal di perkotaan pada 2025”. Harapan Menkeu ini, tidak terlalu sulit akan terjadi, jika melihat tren urbanisasi dari tahun ke tahun. Di mata Sri Mulyani, urbanisasi akan memberi dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan menjadi modal besar bagi Indonesia, tentu dengan catatan, kota harus dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Dia juga menilai perkotaan di Indonesia malah terbebani dengan pembangunan infrastruktur yang tertinggal, kemacetan parah, serta rendahnya kualitas transportasi, sehingga keburukan ini menghambat pertumbuhan ekonomi (tirto.id, 19 Desember 2017).

Antara pertumbuhan dan keburukan adalah wajah kontradiksi urban, dan berbagai macam keburukan adalah paradoks urbanisasi. Paradoks urbanisasi dan kota itu mudah dilihat secara telanjang pada kasus Jakarta. Jakarta adalah episentrum urbanisasi, sekaligus pusatnya pusat, pusat segala-galanya. Jakarta adalah bukti peradaban modern, kekayaan, kemajuan, kekuasaan, kemewahan, kemegahan, dan masih banyak lagi. Tetapi Jakarta mengandung kontradiksi dan paradoks. Gedung-gedung menjulang tinggi dan megah berdampingan dengan pemukiman kumuh. Kekayaan yang melimpah hidup berdampingan dengan kemiskinan yang memprihatinkan. Meskipun angka statistik menunjukkan Jakarta memiliki angka kemiskinan yang paling rendah dan indeks pembangunan manusia paling tinggi, tetapi kehidupan kaum miskin kota di kolong jembatan, pemukiman kumuh, maupun di setiap titik wilayah, tidak bisa dianggap remeh. Banjir dan macet adalah sisi lain paradoks Jakarta, yang selalu dirasakan, juga menjadi buah bibir oleh siapapun di setiap ruang dan waktu. Berbagai cara telah ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi

dua masalah ini, tetapi banjir dan macet merupakan keabadian Jakarta. Jakarta juga arena kontestasi kekuasaan, yang justru menantang perubahan progresif, sehingga lebih sering hadir sebagai kontestasi yang mundur ke belakang.

Masalah urbanisasi sudah lama menjadi perhatian kajian para ahli. Ahli Bank Dunia, Blane Lewis, misalnya, dengan analisis deret waktu Indonesia selama periode 1960-2009, menunjukkan bahwa tingkat urbanisasi secara positif terkait dengan pertumbuhan ekonomi tetapi tingkat perubahan urbanisasi berkorelasi negatif dengan pertumbuhan output ekonomi. Analisis panel juga menyiratkan bahwa dampak berbahaya dari pertumbuhan populasi perkotaan terkait dengan pengeluaran infrastruktur publik lokal yang tidak memadai. Pemerintah daerah yang berinvestasi lebih banyak dalam infrastruktur lebih mampu mengatasi dampak negatif dari urbanisasi yang cepat terhadap pertumbuhan ekonomi (Lewis, 2014).

Mustafa Elnagi Elsamani Hassan dan Agus Joko Pitoyo dengan positivisme, meneliti tentang hubungan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi sampai pada level provinsi, yang memanfaatkan data statistik detail tahun 1971-2010. Secara umum penelitian ini menunjukkan ada hubungan positif yang kuat antara tingkat perkembangan ekonomi regional dan tingkat urbanisasi. Namun banyak provinsi menyimpang dari generalisasi ini. Dalam kasus-kasus ekstrem, beberapa provinsi (Kalteng, Jambi, Papua, Papua Barat) diklasifikasikan sebagai daerah yang lebih maju tetapi masih kurang urban atau, secara sederhana mengalami penyimpangan ke bawah, karena infrastruktur yang buruk. Sebaliknya, Yogyakarta, memiliki tingkat perkembangan ekonomi lebih rendah daripada tingkat urbanisasi (Elnagi, Hassan, Pitoyo, & Mada, 2017).

Penelitian di jantung urbanisasi itu menunjukkan bahwa antara tujuan urbanisasi dengan hasil pertumbuhan ekonomi tidak berjalan secara linear. Data makro juga menunjukkan kontribusi urbanisasi terhadap GDP di Indonesia masih minim dibanding negara Asia lainnya. "Di China setiap 1 persen peningkatan urbanisasi bisa meningkatkan 3% GDP. Di Asia Pasifik dan Asia Timur bisa meningkatkan GDP 2,7%. Kemudian di Indonesia hanya bisa meningkatkan 1,4% GDP dari setiap 1 persen

peningkatan urbanisasi," demikian ungkap Menteri Bambang Brodjonegoro (*Kompas*, 3 Oktober 2019). Jika masalah-masalah urbanisasi tidak segera diselesaikan, maka bukan nilai tambah berupa peningkatan PDB yang akan didapat, melainkan ledakan urbanisasi yang tak terbendung dan menimbulkan masalah-masalah baru.

Karena paradoks dan kontradiksi Jakarta yang sulit diatasi itulah, Presiden Joko Widodo Agustus 2019 mengambil keputusan untuk memindahkan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemindahan Ibukota ini menjadi bagian dari *platform* "Indonesia centris". Para pihak yang "menyintai" modal, kekayaan dan Jakarta, pasti melakukan protes keras terhadap kebijakan pemindahan Ibukota. Menurut kalkulasi untung-rugi para penolak, pemindahan Ibukota ini sangat rugi. Mereka juga berpendapat bahwa anggaran sebesar 400 trilyun rupiah lebih baik digunakan untuk memperbaiki Jakarta ketimbang untuk membangun Ibukota baru. Memang, sebagian besar penduduk kota besar sangat berkomitmen pada politik liberal di tingkat nasional, tetapi merasa sama nyamannya dengan kepentingan mengakar yang berusaha menghalangi perubahan di tingkat lokal (Yglesias, 2012). Sebaliknya daerah tentu akan cemburu jika Pemerintah RI terus mengucurkan uang besar untuk memperbaiki Jakarta. Daerah umumnya menyambut baik pemindahan Ibukota, sekaligus berharap kepada Pemerintah RI agar lebih banyak memperhatikan kabupaten, desa, pedalaman, dan perbatasan di penjuru tanah air.

Kerja pemindahan Ibukota tentu sedang mengalami jeda di tengah pandemi Covid-19. Tetapi isu urbanisasi tetap krusial, justru di tengah krisis pandemi. Sudah ratusan ribu warga mudik (pulang kampung) dari Jakarta dan sekitarnya ke Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan daerah-daerah lain. Mobilitas orang dari "daerah merah" ini tentu membawa perluasan penularan virus sampai ke pelosok negeri, sekaligus menambah jumlah orang yang terpapar virus. Krisis dan mudik ini memberi pelajaran bahwa kota bersifat semu, rapuh, dan rentan terhadap risiko kesehatan dan dampak ekonomi. Para pemudik umumnya mengaku tidak punya apa-apa lagi di Jakarta, dan mereka akan mencari ketenangan hidup di desa kampung halamannya. Penularan corona memang

sampai ke desa, tetapi masih dalam jumlah kecil, yang masih terkendali dan bisa dikendalikan dengan protokol lokal. Secara ekonomi, desa tidak terlalu terdampak secara serius, meskipun dari dulu hingga kini ekonomi desa bersifat subsisten (Scott, 1976). Ketersediaan pangan dan mekanisme pembagian sosial secara komunal dalam kehidupan desa bisa menyelamatkan orang dari kelaparan, meskipun mekanisme ini disebut oleh Clifford Geertz sebagai “berbagi kemiskinan” (*shared poverty*) karena orang desa hidup dalam involusi pertanian (Geertz, 1963).

Meski desa menolong, tetapi bukan berarti kondisi subsistensi-involusi, sebagai korban urbanisasi itu, harus diawetkan. Kondisi desa itu justru sangat kritis, yang mengharuskan kita untuk meninjau ulang kontradiksi dan paradoks urbanisasi. Karena itu tulisan ini hendak menyampaikan kritik terhadap urbanisme-urbanisasi, sekaligus menawarkan ruralisasi, yang bergerak kembali ke per(des)aan, dengan agrikultur sebagai tulang punggung, sekaligus kabupaten, desa, petani, nelayan, peternak dan lain-lain sebagai pemilik dan pemainnya.

## METODOLOGI

Penelitian ilmu sosial humaniora, termasuk isu kemiskinan dan urbanisasi, didominasi oleh mazhab empirisme, naturalisme, dan positivisme. Ketiganya ini mempunyai kesamaan yang lazim disebut dengan positivisme, atau juga disebut saintisme. Positivisme memanfaatkan empirisme sebagai basis menentukan ontologi realitas, yakni pengetahuan harus dibangun berdasarkan pengalaman dan fakta empirik, serta memanfaatkan naturalisme sebagai basis epistemologi atas kebenaran yang obyektif sesuai hukum alam (Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 2018).

Artikel ini bukanlah penelitian empirisme dengan studi demografi, geografi dan ekonomi, tetapi sebagai kajian interpretisme yang bekerja dengan ilmu politik. Mengikuti pendapat Mark Bevir dan Jason Blakely, ilmuwan politik bebas menggunakan metode apa pun yang paling berguna untuk tujuan penelitian dengan landasan etik dan nilai yang berpihak (Bever & Blakely, 2018). Penulis hendak melakukan

analisis kritis terhadap paradoks urbanisasi, dan sekaligus berpihak menawarkan ruralisasi, sebab selama ini desa dikalahkan oleh urbanisasi.

Atas dasar itu, artikel ini bekerja dengan tradisi post-positivisme, yakni dengan analisis interpretif. Para ilmuwan politik memiliki alasan etis untuk mengadopsi paradigma interpretif. Secara khusus, pendekatan interpretatif memberikan para ilmuwan politik akun yang lebih baik tentang sifat dan peran nilai-nilai dalam kehidupan manusia, perasaan tentang bagaimana masa lalu historis relevan secara etis, kemampuan untuk memajukan ilmu pengetahuan yang terlibat secara politis, dan kritik yang disengaja tentang teknokrasi. Ilmuwan politik harus bebas untuk terlibat secara kritis, meneliti, dan bahkan secara normatif mengevaluasi posisi etika manusia (Mark Bevir dan Jason Blakely 2017).

Tradisi post-positivisme berpendapat bahwa pengetahuan adalah kekuasaan, tidak ada pengetahuan yang obyektif-netral seperti diklaim oleh positivisme. Fakta empirik yang disajikan oleh kaum positivis tentu merupakan fakta naif, sebab sudah dikonstruksi sepihak oleh peneliti sesuai ukuran yang dibuatnya untuk membenarkan argumen teorinya.

Sebaliknya penelitian interpretif berfokus pada pemahaman pengalaman subjektif daripada sekadar mengamati makna di balik fakta, untuk menjelaskan dan memahami data, sekaligus menafsirkan kehidupan dan masyarakat melalui pengalaman manusia. (Ban, 2020; Bever & Blakely, 2020; Wedeen, 2020)

Analisis interpretif yang digunakan artikel ini memanfaatkan teks, argumen, atau diskursus sebagai data utama, yang tidak lain adalah argumen aktor, baik presiden, menteri, maupun ilmuwan. Sebagai contoh, penulis membandingkan dan menganalisis argumen Presiden Jokowi yang berupaya membendung urbanisasi dengan argumen Menteri Sri Mulyani yang mendukung urbanisasi. Posisi penulis adalah mengkritik pandangan pendukung urbanisasi dan mendukung argumen ruralisasi yang membendung urbanisasi. Fakta atau data dalam bentuk angka makro penulis gunakan untuk mendukung analisis interpretif atas diskursus tersebut.

Diskursus politik itu menjadi pintu masuk untuk menafsirkan urbanisasi.

Langkah kedua penulis adalah studi pustaka, yang melakukan pencarian pengetahuan para ahli yang berpandangan kritis terhadap urbanisasi. Kajian ini berguna untuk membentuk kerangka konseptual, yang penulis gunakan untuk memahami dan mengkritik kontradiksi dan paradoks urbanisasi, sekaligus kritik terhadap solusi yang berpusat pada “kota centris”. Kerangka konseptual juga menyajikan gagasan ruralisasi, sebagai alternatif atas paradoks urbanisasi, sekaligus sebagai gagasan untuk mendukung “Indonesia centris”.

Meski artikel ini mengutamakan studi tentang gagasan dan analisis diskursus, tetapi bukan berarti penulis mengabaikan data empirik, tentu penyajian data empirik yang penulis sajikan sungguh berbeda dengan penelitian empirisme-positivisme. Dengan studi pustaka, penulis menunjukkan data narasi tentang paradoks urbanisasi serta kegagalan proyek ruralisasi yang selama ini sudah berjalan. Sebagai studi gagasan, artikel ini menyajikan sepotong cerita ruralisasi Jepara, sebuah kabupaten paling makmur di Jawa Tengah. Namun, sekali lagi, artikel ini bukan penelitian empirisme komparatif atas Jepara dan kota-kota lain yang sukses. Penulis melakukan interpretasi atas cerita capaian Jepara, sebagai sebuah contoh bahwa gagasan ruralisasi adalah keniscayaan, melampaui pendekatan proyek pembangunan perdesaan.

## KERANGKA KONSEPTUAL

Setiap orang tahu bahwa urbanisasi adalah perpindahan (migrasi) penduduk dari per(des)aan ke per(kota)an. Ini adalah pemahaman paling mudah dan nyata. Namun pengertian urbanisasi yang sesungguhnya adalah proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan. Wilayah kota ditentukan oleh kriteria hukum dan administrasi, hanya mencakup wilayah geografis sebagai bagian dari unit administrasi yang didefinisikan secara hukum. Karena itu kita mengenal pemerintah kota. Namun, banyak daerah perkotaan telah tumbuh jauh melampaui batas-batas kota. Inilah yang disebut aglomerasi perkotaan, yakni populasi nyata yang terkandung dalam kontur wilayah yang berdekatan yang dihuni pada tingkat kepadatan perkotaan tanpa memperhatikan batas-batas administratif. Aglomerasi

perkotaan ditentukan oleh kepadatan: aglomerasi berakhir di mana kepadatan populasi turun di bawah ambang kritis. Konsep komprehensif adalah area metropolitan, yang mencakup aglomerasi perkotaan dan daerah sekitarnya dengan kepadatan pemukiman lebih rendah yang juga berada di bawah pengaruh langsung kota. (Nguyen & Nguyen, 2018; United Nations, 2006). Dengan demikian, laju urbanisasi sebesar 56% berarti menunjuk pada aglomerasi perkotaan itu, sekaligus menunjuk pada besaran penduduk yang mendiami wilayah perkotaan.

Pertumbuhan itu tentu karena pembangunan. Wilayah yang semula bercirikan perdesaan, karena pengaruh pembangunan dan urbanisme, bisa berubah menjadi wilayah perkotaan. Secara administratif desa bisa berubah menjadi kelurahan. Sebagai contoh adalah kawasan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek), yang sebelum 1960-an lebih banyak memperlihatkan ciri perdesaan dan agrikultur, namun pelan-pelan mulai dekade 1970-an, wilayah itu ditumbuhi beton, pabrik, dan perumahan, sehingga muncul perkotaan baru sebagai perluasan dari metropolitan Jakarta. Sekarang, kita mengenal kawasan Jabodetabek sebagai aglomerasi perkotaan dengan jumlah penduduk mencapai hampir 30 juta orang. Demikian juga dengan sebagian desa di Sleman dan Bantul yang berdekatan dengan Kota Yogyakarta, dapat disebut sebagai aglomerasi perkotaan karena dinamika urbanisasi yang terus berjalan, meskipun secara administratif desa-desa itu tidak berubah menjadi kelurahan.

Dengan demikian urbanisasi dapat dimengerti menjadi tiga: (1) pembentukan per(kota)an; (2) perpindahan penduduk dari per(des)aan ke per(kota)an, serta (3) perluasan kota baru atau pembentukan aglomerasi perkotaan yang merambah ke ruang perdesaan. Para ahli konvensional hari ini berbicara urbanisasi lebih banyak menunjuk pada pengertian ketiga (aglomerasi perkotaan), sebab aglomerasi ini menjadi pertanda baik bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang harus terus diperluas, tetapi juga menimbulkan dampak kontradiksi dan paradoks yang kompleks (kepadatan, kemiskinan, ketimpangan, kemacetan, banjir, kejahatan, dan lain-lain). Mereka bisa disebut sebagai penganut

developmentalisme, neoliberalisme dan urbanisme, yang melahirkan pengetahuan, praktik dan kebijakan tentang tata kota, manajemen perkotaan, urban governance, urban development, dan lain-lain. Karena sibuk dengan hal ihwal per(kota)an maka mereka agak mengabaikan konsepsi urbanisasi dalam pengertian perpindahan penduduk dari desa ke kota.

Ketiga makna urbanisasi itu dapat dipahami dengan tiga perspektif yang saling terkait. **Pertama**, urbanisasi adalah pembentukan negara, baik yang terjadi di Barat maupun di tanah jajahan kolonialisme. Karl Marx, dengan cara orientalis, pada tahun 1850-an pernah bicara tentang kebodohan kehidupan pedesaan (*the idiocy of rural life*), yang dihubungkan dengan desa, kota, negara dan kapitalisme. Keyakinan Marx akan kebodohan kehidupan pedesaan semakin kuat setelah dia mengamati dan mengatakan tentang moda produksi Asia di India, China, serta Jawa dan Bali. Marx merasakan jurang sosial dan politik yang luas antara suprastruktur negara absolut dan desa yang menjadi sandarannya. Desa-desa digambarkan sebagai komunitas yang terisolasi, kohesif, dan mandiri yang diorganisasikan ke dalam bentuk komunisme primitif dan patriarkal. Unsur-unsur sentral konsepsi desa adalah swasembada dalam kerajinan domestik dan pertanian, tidak adanya perdagangan dengan dunia luar, dan karena itu isolasi hampir lengkap, serta kurangnya keterlibatan dalam urusan suprastruktur negara, selain dari keharusan untuk membayar upeti, pajak, dan menyediakan tenaga kerja paksa atas permintaan sang raja (Smith, 2013). Petani pedesaan hidup di bawah naungan despotisme Timur, dikontrol dan dieksploitasi oleh para despot mulai dari kepala desa hingga sang raja.

Karena itu secara orientalis, Marx memandang dan mendukung kolonialisme Barat pada dunia Timur untuk menghancurkan despotisme dan struktur sosial masyarakat desa yang stagnan (Anderson, 2011; Tichelman, 1980) Kapitalisme yang digerakkan oleh kaum borjuis melalui industrialisasi dan urbanisasi di kota, akan menolong penderitaan petani pedesaan yang dikungkung oleh kebodohan kehidupan pedesaan.

Ketika Marx bicara soal itu, negara kapitalis Barat dan negara kolonial di Timur, telah terbentuk. Charles Tilly dengan sangat baik melakukan analisis pembentukan negara (state formation) kapitalis di Eropa Barat, dengan diktumnya yang terkenal: "perang menciptakan negara, negara menciptakan perang" (Tilly, 1975). Dari diktum ini Tilly memetakan sirkuit timbal balik segi empat: negara, perang, kota, dan modal. Perang menghasilkan negara yang kuat, sentralistik, birokratik, dan mampu menghasilkan law and order yang kokoh. Dengan perang, negara menciptakan kota dan modal. Kota membentuk negara. Kota menjadi pusat kekuasaan negara, pusat revolusi industri, pusat peradaban, dan pusat modal. Negara melakukan perang melawan, menduduki dan menyerap desa (sebagai organisasi kekuasaan lokal dan basis feodalisme) ke dalam tubuh negara-kapitalis. Negara menciptakan jaringan urbanisasi modal dan manusia dari desa ke kota untuk mendukung perdagangan dan industri.

**Kedua**, revolusi perkotaan (*urban revolution*). Revolusi perkotaan mengacu pada kemunculan kehidupan kota dan transformasi bersamaan dari sistem berbasis agraria sederhana ke sistem manufaktur dan perdagangan yang kompleks dan hierarkis. Istilah ini juga mengacu pada era pertumbuhan metropolitan atau megalopolis saat ini, pengembangan pinggiran kota, dan ledakan kota primata atau mega. Arkeolog V. Gordon Childe menciptakan istilah revolusi perkotaan untuk menjelaskan serangkaian tahapan dalam pengembangan kota-kota yang mendahului Revolusi Industri abad ke-19. Bagi Childe, revolusi pertama - "Revolusi Pertanian" - terjadi ketika berburu dan mengumpulkan masyarakat menguasai keterampilan produksi makanan dan mulai hidup dalam kelompok yang stabil dan menetap. Revolusi kedua - "Revolusi Urban" - dimulai selama milenium keempat dan ketiga SM dalam peradaban Mesopotamia dan Timur Dekat. Revolusi perkotaan mengantarkan era baru pertumbuhan populasi, perkembangan kota yang kompleks, dan pengembangan lembaga-lembaga seperti negara birokrasi, peperangan, arsitektur, dan penulisan (Childe, 1950).

Henri Lefebvre (2003 [1970]) maupun David Harvey (1985) merupakan dua ilmuwan kritis yang mempertajam

pembahasan tentang revolusi perkotaan. Revolusi ini ditandai dengan pembentukan kota, diikuti dengan terbentuknya masyarakat urban yang kompleks secara ekonomi, sosial, dan politik. Dari sudut ekonomi, Harvey (1985) menyebut konsep urbanisasi modal. Kota dapat dipahami sebagai tempat secara spasial bagi manusia, barang, dan alat produksi terkonsentrasikan. Urbanisasi modal itu ditandai dengan produksi pertanian telah kehilangan semua otonomi di negara-negara industri utama dan sebagai bagian dari ekonomi global. Ini bukan lagi sektor utama ekonomi, atau bahkan sektor yang dicirikan oleh ciri-ciri khusus (selain dari keterbelakangan). Meskipun ciri-ciri lokal dan regional sejak saat produksi pertanian mendominasi belum sepenuhnya hilang, telah berubah menjadi bentuk produksi industri. Pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi menjadi apa yang disebut Henry Lefebvre (2003 [1970]), sebagai legitimasi diri, yang memperluas efeknya ke seluruh wilayah negeri, negara, dan benua. Akibatnya, unit tradisional khas kehidupan petani, yaitu desa, telah berubah. Ia diserap atau dilenyapkan oleh unit yang lebih besar, telah menjadi bagian integral dari produksi dan konsumsi industri.

Sementara urbanisasi modal menghasilkan kaleidoskop yang memukau dan saling bertentangan dari pengalaman urban, para kapitalis memobilisasi dan membentuk masyarakat urban dalam cara-cara yang menentukan dan strategis dalam pencarian tanpa henti dan panik mereka dalam menciptakan atau mempertahankan kondisi untuk produksi dan penggunaan nilai lebih (Harvey, 1985). Perkotaan adalah tempat peredaran modal yang mengalir melalui bentuk-bentuk tenaga kerja, sarana dan kondisi produksi, modal finansial (fiktif), dan tanah dalam segala bentuknya bersatu untuk menghasilkan lanskap sosio-spasial yang dapat menerima dan mendukung akumulasi modal. Dalam pengertian ini, kaum urban mengekspresikan berbagai kontradiksi yang melaluinya kapitalisme berkembang. Secara bersamaan situs dan lokasi untuk produksi sambil berfungsi sebagai simpul penahan untuk sirkulasi modal global. Ketegangan antara kebutuhan untuk memperbaiki modal di tempat agar sirkulasi bentuk modal lain untuk mempercepat koreografi banyak restrukturisasi perkotaan dan menghasilkan

lanskap perkotaan yang sangat diperebutkan dan gelisah.

Secara sosial dan demografis, konsentrasi populasi berjalan beriringan dengan mode produksi. Tatanan kota tumbuh, memperluas perbatasannya, merusak sisa-sisa kehidupan agraris. Ungkapan ini, "struktur kota," tidak secara sempit mendefinisikan dunia kota yang dibangun tetapi semua manifestasi dari dominasi kota atas negara. Dalam hal ini, rumah liburan, jalan raya, supermarket di pedesaan adalah bagian dari struktur urban. Dari berbagai kepadatan, ketebalan, dan aktivitas, satu-satunya daerah yang tidak tersentuh olehnya adalah mereka yang stagnan atau sekarat, mereka yang diberikan kepada "alam." Dengan menurunnya kehidupan desa di masa lalu, produsen pertanian, "petani," dihadapkan dengan kota pertanian.

Kota juga menjadi arena dan pusat politik-kekuasaan. Kota dihuni pejuang, pangeran, bangsawan, elite politik, para pemimpin militer, administrator dan juru tulis. Kota politik tidak dapat dibayangkan tanpa menulis dokumen, undang-undang, inventaris, pengumpulan pajak. Itu sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah dan kepada kekuasaan. Namun itu juga menyiratkan adanya pertukaran untuk mendapatkan bahan-bahan penting untuk peperangan dan kekuasaan (logam, kulit, dan sebagainya), dan pengerjaan untuk membuat dan merawatnya. Dengan demikian, kota seperti itu juga terdiri dari pengrajin dan pekerja. Kota politik mengelola, melindungi, dan mengeksploitasi wilayah yang luas. Ia mengelola proyek pertanian skala besar seperti drainase, irigasi, pembangunan bendungan, pembukaan lahan. Ini mengatur sejumlah desa (Henry Lefebvre (2003 [1970])).

**Ketiga**, urbanisasi dapat dilihat dari sisi ideologi dan kebijakan pembangunan yang bias perkotaan. Konsep urban bias pertama kali disampaikan oleh Michael Lipton, yang dengan analisis kelas menunjukkan kesenjangan ekonomi-politik antara pedesaan dan perkotaan. Teori bias perkotaan Lipton memiliki dua proposisi: proses pembangunan di Dunia Ketiga secara sistematis abai terhadap pedesaan dan bias tertanam dalam struktur politik yang didominasi oleh perkotaan. kelompok. Dengan kata lain, daerah pedesaan miskin

karena mereka tidak memiliki kekuasaan politik. Demikian ungkap Michael Lipton:

"... Konflik kelas yang paling penting di negara-negara miskin di dunia saat ini bukanlah antara tenaga kerja dan modal. Juga bukan antara kepentingan asing dan nasional. Itu adalah antara kelas pedesaan dan kelas perkotaan. Sektor pedesaan mengandung sebagian besar kemiskinan dan sebagian besar sumber kemajuan potensial berbiaya rendah; tetapi sektor perkotaan mengandung sebagian besar artikulasi, organisasi, dan kekuasaan. Jadi kelas-kelas perkotaan telah mampu memenangkan sebagian besar putaran perjuangan dengan pedesaan..."

Jika ketiga pengertian di atas digabung menjadi satu maka lahir satu kata: urbanisme. Urbanisme adalah pandangan hidup, gaya hidup, ideologi, ekonomi, politik dan kebijakan yang mengutamakan dan memperkuat kota dan perkotaan. terus-menerus memperluas aglomerasi perkotaan untuk ruang dan mesin kapitalisme; mengonstruksi kota sebagai utopia kemajuan dan kekayaan; menempatkan kota sebagai "negara dalam negara" yang mengendalikan-mendominasi seluruh daerah dan desa di seluruh penjuru negeri. Kota merupakan pusat dan aktor urbanisme. Negara menciptakan kota. Kota menciptakan negara, memperkaya negara, mengatur negara, sekaligus menempatkan negara sebagai entitas dalam perkotaan global (Warren Magnusson, 2011). Kota adalah agen dan arena neoliberalisme, yang telah menghasilkan bukan negara kecil dan langsing, tetapi negara pasar yang membengkak melalui banyak campur tangan pemerintah (Plant, 2010) Karena itulah kota-kota metropolitan sulit diperintah oleh pemerintah negara yang berdaulat (Lipton, 1977).

Urbanisme mengonstruksi hubungan kota dan desa dengan kerangka utopia kota (kebaikan kota) dan distopia desa (kebodohan dan keburukan desa). DNA urbanisme adalah anti-desa. Monika Krause (2013) menyebut gejala "imperialisme intelektual perkotaan" yang memandang pedesaan dari perspektif perkotaan. Menurut kaum urbanis, desa itu kolot dan tertinggal, kota itu modern dan maju. Pandangan ini mengarahkan agar orang desa berpandangan kota, agar pindah ke kota. Kaum urbanis merancang dan menjalankan

pendidikan untuk membuat orang desa berhaluan kota, menjadi milenial yang tajir, mengabdikan kepada kapitalisme. Pendidikan menjadi *brain drain*, memfasilitasi mobilitas sosial orang desa, yakni naik kelas dan pindah ke kota. Setelah menjadi urbanis, bekas orang-orang desa itu bersikap anti-desa, meskipun kerap bersikap romantis, dengan mengatakan saya ini orang desa! Urbanis selalu melakukan marginalisasi dan isolasi terhadap desa apabila berbicara tentang kepentingan lokal. Tetapi kalau untuk urusan kota dan modal, yang dibungkus dengan sebutan kepentingan nasional, maka kaum urbanis akan melakukan eksploitasi terhadap desa. Hasil bumi dan tenaga kerja murah dari desa merupakan modal dan alat produksi yang mereka ambil, yang David Harvey menyebutnya sebagai urbanisasi kapital (Harvey, 1985).

Urbanisme itu mengandung paradoks yang serius. Baik Lefebvre maupun Neil Brenner menjelaskan bagaimana urbanisasi bergerak ke dua arah. Arah pertama adalah implosi, yaitu ledakan ke dalam yang menyebabkan kemunculan konsentrasasi spasial (Brenner, 2014; Lefebvre, 2003). Dalam urbanisasi, model implosi itu, misalnya, dapat kita lihat dengan makin padat suatu area kota dengan penduduk dan gedung, permukiman kumuh, polusi, macet, ketimpangan ekonomi, kaum miskin kota, dan lain-lain. Arah kedua adalah eksplosif, yaitu pertumbuhan lateral dari suatu kawasan kota yang meluas ke pedesaan. Termasuk dalam gerak eksplosif adalah pertumbuhan Jakarta menjadi Jabodetabek, maupun satu kawasan desa atau pedesaan dijadikan sebagai bentang alam operasional untuk memenuhi kebutuhan kota. Pada titik inilah James Midgley melihat paradoks urbanisasi dalam bentuk pemiskinan desa dan pemiskinan kota. Pemiskinan kota adalah bentuk implosi, dan pemiskinan desa merupakan dampak dari eksplosif (Midgley, 1995).

Ketika urbanisasi mengandung paradoks, maka muncul gagasan lain yang bergeser dari ruang kota ke ruang desa, baik dalam bentuk pembangunan pedesaan maupun ruralisasi (*ruralization*). Konsep ruralisasi ini masih sangat jarang ditemukan dalam literatur urbanisasi maupun literatur studi pedesaan (Chigbu, 2015). Ruralisasi bukan sekadar kembali ke desa bernostalgia secara romantis pada kehidupan desa yang indah; bukan sekadar deurbanisasi dalam

bentuk arus balik migrasi dari kota ke desa, bukan sekadar pembangunan perdesaan yang menaruh perhatian pada infrastruktur dan produksi komoditas lokal, bukan pula kolonisasi dan penetrasi kota ke desa dengan memperluas aglomerasi perkotaan (Wilbur, 2013; Krause, 2013). Monika Krause berupaya memahami ruralisasi dengan cara melihat hubungan perkotaan-perdesaan bukan berputar-putar dengan teori urbanisasi, melainkan melihat dari sisi perspektif perdesaan, seraya berusaha menggabungkan kembali perkotaan-perdesaan sebagai properti solidaritas, tempat, pemerintahan, dan mata pencaharian (Krause, 2013).

Empat butir itu (solidaritas, tempat, pemerintahan, dan pencaharian) itu bisa digunakan untuk melihat perdesaan, sejalan dengan M. Woods yang melihat ruang perdesaan secara utuh dalam tiga makna: (a) perdesaan sebagai lokalitas: perdesaan terdapat manusia, masyarakat, identitas, institusi maupun desa yang lengkap dengan tatanan sosial dan budaya setempat; (b) kehidupan: ruang perdesaan sebagai tempat dan basis kehidupan-penghidupan masyarakat setempat; dan (c) representasi: ruang perdesaan menghadirkan institusi lokal dan asosiasi lokal yang mandiri dan kuat, melakukan konsolidasi dan negosiasi dengan negara maupun modal dalam pembangunan perdesaan (M. Woods, 2013).

“Negara membutuhkan perdesaan tidak hanya demi kesetaraan tetapi juga untuk pembangunan berkelanjutan”, demikian Sandeep Raveesh, sembari dia memahami ruralisasi sebagai "konstruksi sistematis daerah perdesaan dengan meningkatkan peluang penghidupan dan fasilitas yang lebih baik" (Raveesh, 2014). Konsepsi tentang ruralisasi yang lebih bertenaga disampaikan oleh Uchendu Eugene Chigbu (2015), yang menegaskan bahwa ruralisasi adalah solusi atas masalah urbanisasi, sebagai urbanisasi terbalik, kontra-urbanisasi dan deurbanisasi, yang memberikan kepercayaan kepada keindahan perdesaan, sebagai jalan untuk transformasi kehidupan perdesaan. Perdesaan menjadi gaya hidup, penghidupan dan penghidupan.

Aspek ekonomi sangat penting dalam ruralisasi. Perhatian pada perdesaan selalu menghasilkan sikap skeptis banyak orang, sebab lahan di desa sudah terbatas, dan pertanian tidak lagi menjajikan hidup bagi

orang desa. Argumen ini benar sebagian, sebab desa, petani dan pertanian mengalami involusi dan subsistensi, tetapi juga keliru pada sisi lain, sebab desa beserta isinya justru mengalami marginalisasi dan tidak memperoleh perhatian yang serius oleh negara. Perhatian negara lebih banyak pada kota, perdagangan, industri dan jasa dengan kebijakan dan modal yang sangat besar. Dengan begitu ruralisasi harus memperhatikan aspek ekonomi sebagai bagian dari makna kehidupan dan penghidupan masyarakat lokal, namun bukan berarti mempertahankan involusi dan subsistensi, sebaliknya juga menerima pertumbuhan ekonomi tetapi bukan berarti menjadi kapitalisme besar yang dikontrol oleh dunia global. Argumen ini mengingatkan akan konsep “ekonomi kerakyatan” yang pernah digagas oleh Sarbini Sumawinata, Mubyarto, Sahjir, Dawan Rahardjo, Revrisond Baswir, dan lain-lain. Menantang ekonomi kapitalis urban, konsep ekonomi kerakyatan pada dasarnya menyentuh langsung terhadap pertanian dalam arti luas, rakyat kecil (petani, nelayan, peternak, perajin, dan sebagainya) dan perdesaan. Karena pertanian mengalami involusi-subsistensi, maka Sarbini Sumawinata menggagas industrialisasi perdesaan-kerakyatan yang memberi nilai tambah pada pertanian dengan kekuatan rakyat sebagai aktor utamanya (Sumawinata, 2004).

Gagasan lain yang serupa dengan ekonomi lokal dan ekonomi kerakyatan adalah agropolitan, yang pernah disampaikan oleh John Friedmann dan Mikes Douglass (1975), untuk menantang urbanisasi dan pembangunan perdesaan terpadu yang dominan pada dekade pasca Perang Dunia II. Berbeda dengan aglomerasi perkotaan melalui jalur urbanisasi, agropolitan adalah “kota di ladang” yang digerakkan secara lokal dengan perencanaan radikal (*radical planning*). Dua orang itu bicara agropolitan karena didasari atas kritik mereka terhadap modernisasi: (a) Terjadinya *hyper-urbanization*, akibat terpusatnya modal dan penduduk di kota-kota yang padat; (b) Pembangunan “modern” hanya terjadi di beberapa kota, sementara daerah pinggiran relatif tertinggal; (c) Tingkat pengangguran yang relatif tinggi; (d) Pembagian pendapatan yang tidak merata dalam bentuk ketimpangan dan kemiskinan; (e) Kekurangan bahan pangan, akibat

perhatian pembangunan bias pada industrialisasi perkotaan; (f) Penurunan kesejahteraan petani dan orang desa; dan (g) Terjadinya ketergantungan pada dunia luar. Inti gagasan agropolitan mereka adalah: akses rakyat ke lahan pertanian dan air termasuk irigasi; desentralisasi politik dalam pengambilan keputusan; kebijakan nasional yang beralih menuju diversifikasi produk pertanian; kebijakan yang dijalankan secara demokratis melalui strategi dari bawah (*bottom up*), partisipatif, serta mempertimbangkan konteks lokal. Dengan begitu, agropolitan tidak hanya mengedepankan pendekatan wilayah, tata ruang, dan komoditas, tetapi yang terpenting adalah pendekatan kelembagaan dan politik. Agropolitan bukan sebuah proyek dari atas, melainkan sebagai kebijakan dan gerakan oleh entitas lokal, dengan ditopang desentralisasi, demokrasi lokal, dan kolaborasi. Kabupaten, desa, dan petani menjadi pemain penting dalam hal ini.

Konsep agropolitan itu sudah diadaptasi oleh banyak ilmuwan di Indonesia (Misalnya: Mahi, 2007; Rustandi & Pranoto, 2007), dan dijadikan proyek oleh Kementerian Pekerjaan Umum sejak 2002 dan lebih gencar setelah hadir UU No. 26/2007 tentang Tata Ruang. Tetapi gagasan dan praktik agropolitan selama dua dekade telah menyimpang jauh dari prinsip “perencanaan radikal” ala Friedmann dan Douglass. Mereka bicara agropolitan tetap dengan “*seeing like city*” dan teknikal: kewilayahan, tata ruang, komoditas, dan lain-lain. Nalar dan perspektifnya tidak berbeda dengan urbanisasi. Nalar itu teknokratik dan anti-politik, yakni mengabaikan relasi kuasa, kontestasi ekonomi-politik, serta kepentingan daerah, desa dan rakyat. Bahkan juga anti-desa, karena lebih sibuk bicara tata ruang dan komoditas. Agropolitan tidak akan menjadi ruralisasi yang radikal jika desentralisasi, partisipasi, dan teritorialisasi, bersifat teknokratik. Kalau teknokratik, maka yang bekerja hanya pendekatan fiskal dan proyek (John Friedmann & Douglass, 1975).

Argumen politik yang kritis itu penulis dasarkan pada pendapat John Friedmann yang menggagas agropolitan, sekaligus juga memantau perkembangan empirik serta menilai distoris yang muncul di lapangan. Dengan argumen politik, Friedmann berpendapat berikut ini:

“Strategi agropolitan melibatkan pelimpahan kekuasaan yang substansial ke unit-unit teritorial kecil dalam sistem keseluruhan pemerintahan dan masyarakat. Devolusi dalam agropolitan perlu dipertimbangkan dalam hal argumen politik, ekologi, dan teknis-administratif. Sebagai strategi politik, pengembangan agropolitan memerlukan komitmen sebagian elit nasional, dan ini mungkin sulit diperoleh. Strategi alternatif, di sisi lain, walaupun mungkin berhasil ketika diukur dalam hal produksi, tidak mungkin melibatkan lebih dari sebagian kecil populasi petani. Pilihan politik membenteng antara perencanaan untuk kesetaraan dan penentuan nasib sendiri politik di tingkat terendah pemerintahan teritorial, atau perencanaan untuk ketidaksetaraan dan otokrasi politik.” (J. Friedmann, 1985).

Dengan demikian agropolitan akan membuahkan sukses besar ketika secara politik bekerja pada perencanaan untuk kesetaraan dan penentuan nasib sendiri politik di tingkat terendah pemerintahan teritorial. Sebaliknya agropolitan akan gagal kalau bekerja dalam perencanaan untuk ketidaksetaraan dan otokrasi politik. Dalam pandangan penulis, otokrasi politik tidak serta merta berbentuk rezim otoritarian, sentralistik dan represif ala Orde Baru, tetapi juga bisa berbentuk kebijakan dan program agropolitan yang teknokratik, seragam, dan terpusat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Potret Paradoks Urbanisasi

Urbanisasi adalah proses yang disengaja oleh pemerintah sejak zaman kolonial yang dimulai dengan pembentukan kota Batavia yang kelak menjadi Jakarta, sekaligus juga kota-kota lain. Kota menjadi pusat kekuasaan, modal, peradaban, industri, perdagangan, dan jasa. Pada zaman Orde Baru, Jakarta sudah menjadi kota metropolitan, yang kemudian meluas menjadi megapolitan yang disebut Jabotabek. Proses yang sama juga terjadi di kota-kota besar ibukota provinsi di Indonesia. “Ada gula ada semut” terjadi mengiringi urbanisasi, yakni terjadi arus perpindahan penduduk dari desa ke kota, karena penghidupan desa yang berbasis pertanian mengalami involusi.

Kota-kota besar mengalami kelebihan beban, atau eksplosif, yang mendorong

perluasan aglomerasi perkotaan ke level kota menengah dengan sangat cepat. Kecepatan urbanisasi mengindikasikan bahwa ukuran kota akan semakin membesar, desa akan mengkota, kota kecil akan menjadi kota menengah, kota menengah akan menjadi kota besar dan kota besar akan menjadi *megacity*, kota-kota baru akan terbentuk, tersebar di seluruh nusantara (Hardiansah, 2015) Transformasi ini tentu menjadi bagian dari pembangunan ekonomi dan pembentukan modal (Brenner, 2014). McKinsey Global Institute (2012) membuat sebuah proyeksi bahwa PDRB kota kecil dan kota menengah di Indonesia tahun 2010–2030 akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Kota Jakarta. Para ekonom menilai seluruh potensi ini tentu menjadi modalitas besar dalam mengoptimalkan peran kota sebagai pusat pertumbuhan yang berkelanjutan.

Urbanisasi secara demografis meningkatkan komposisi penduduk perkotaan dibandingkan dengan penduduk pedesaan. Pada tahun 1950, baru 15% penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan. Pada 1990, 40 tahun kemudian, jumlah ini dua kali lipat menjadi 30%. Tabel 1 menambahkan data mutakhir laju urbanisasi dan komposisi demografis, dari tahun 1995 hingga proyeksi tahun 2050. Tahun 2019/2020 sekarang, penduduk kota sudah mencapai 56% dan penduduk desa semakin berkurang, yakni 44% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1. Laju urbanisasi dan komposisi penduduk Indonesia

Tahun	% Penduduk Desa	% Penduduk Kota
1995	64	36
2000	58	42
2005	52	48
2010	50	50
2015	46	54
2020	44	56
2050	33	67

Sumber: Bank Dunia. 2019

Jika berjalan secara linear, maka urbanisasi penduduk (demografi) juga diikuti dengan urbanisasi kapital sekaligus juga perluasan tenaga kerja. Tetapi ternyata ada kontradiksi di sini. Dampak pertumbuhan lebih

kecil ketimpang kecepatan urbanisasi. Menurut laporan Bank Dunia (2019), setiap 1 persen urbanisasi di suatu negara harus mengarah pada peningkatan signifikan dalam produk domestik bruto per kapita (PDB) negara tersebut. Namun, sementara PDB per kapita India dan China masing-masing naik 13 persen dan 10 persen, untuk setiap pertumbuhan urbanisasi 1 persen, PDB per kapita Indonesia hanya meningkat 4 persen untuk setiap pertumbuhan urbanisasi 1 persen. Penyebabnya tidak lain adalah investasi yang rendah dan infrastruktur perkotaan yang buruk. Ujungnya adalah menuntut pemerintah untuk investasi lebih besar lagi terhadap infrastruktur kota.

Kontradiksi juga perlu dilihat dalam konteks relasi desa-kota. Meskipun laju urbanisasi begitu cepat, tetapi dualisme desa-kota masih tampak, yang menggambarkan segregasi spasial dan ketimpangan sosial-ekonomi (Firman, 2004). Bahkan perluasan aglomerasi perkotaan sampai ke level kabupaten/kota, tidak cukup membuka lapangan pekerjaan yang dekat dengan penduduk desa, tidak mendongkrak ekonomi lokal berbasis pertanian, dan juga tidak membendung migrasi orang desa ke kota-kota besar. Migrasi ini menyisakan sejumlah besar populasi lanjut usia di Indonesia untuk hidup sendiri di daerah pedesaan. Sumber penghasilan utama bagi penduduk pedesaan berasal dari pertanian. Statistik Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa dari 140 juta petani, 80% di antaranya berusia 45 tahun ke atas. Kaum pria pindah ke kota dalam jumlah besar, tidak akan ada cukup banyak orang yang mengambil alih praktik pertanian dari para petani tua. Banyak yang mengaitkan gerakan kaum muda ini dengan kerja keras secara manual yang dibutuhkan di sektor pertanian. Juga, para pemuda tidak ingin menghadapi risiko panen yang buruk. Ini mengarah pada keprihatinan utama bagi negara terkait industri pertanian. Ada kemungkinan krisis pangan dalam waktu dekat jika tingkat produksinya tidak meningkat, sehingga impor pangan menjadi solusi mujarab. Petani lansia melanjutkan dengan metode pertanian dasar dan manual karena rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat produktivitas dalam industri pertanian rendah karena hal ini.

Sementara tidak semua penduduk migran ke kota hidup dengan baik di kota. Sebuah situs yang menarik perhatian pada pembangunan, *Indonesia Investment* (2017), membuat laporan: “Setiap tahun, banyak orang Indonesia bermigrasi dari daerah pedesaan ke kota untuk mencari penghidupan. Namun, karena kota sering gagal meningkatkan mata pencaharian pendatang baru, kemiskinan perkotaan dan tingkat pengangguran meningkat. Mereka yang bermigrasi ke kota biasanya mereka yang tidak - atau sangat rendah - pendidikan dan karenanya menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan”.

Urbanisasi penduduk dan kapital di kota dengan sendirinya menyebabkan tipisnya ruralisasi kapital di desa dan pemiskinan penduduk desa. Desa, pertanian, petani, dan kemiskinan selalu menjadi satu paket. Sumbangan pertanian terhadap pendapatan selalu menurun dari tahun ke tahun. Pada dekade 1960-an, pertanian menyumbang PDB masih di atas 50%, tahun 2010 tinggal tersisa 15%, dan tahun 2019 menurun menjadi 12,65%. Angka kemiskinan pedesaan selalu lebih tinggi daripada angka kemiskinan perkotaan. BPS melaporkan bahwa persentase penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 9,41%, dengan komposisi kemiskinan perkotaan sebesar 6,69% dan kemiskinan pedesaan sebesar 12,85%. Pada tahun yang sama, sebesar 49,41% rumah tangga miskin menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

Narasi itu menyajikan beberapa kesimpulan yang terkait dengan paradoks urbanisasi. Pertama, janji urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi, tidak terwujud dengan baik, sebab sumbangan urbanisasi atas ekonomi masih rendah. Kedua, terjadi dualisme sekaligus ketimpangan antara desa dan kota. Desa, pertanian, petani, dan kemiskinan selalu menjadi satu paket, yang tertinggal dari kota. Kemiskinan lebih besar di desa dan sektor pertanian. Ketiga, migrasi penduduk desa ke kota dilakukan oleh mereka yang berkemampuan rendah, sehingga malah menyumbang kaum miskin kota dan pengangguran, dan tentu menambah beban bagi kota.

### Solusi “Kota Centris”

Pembangunan adalah cara pandang arus utama untuk memahami dan mengatasi

paradoks urbanisasi perkotaan. Ada pembangunan ekonomi dan ada pula pembangunan sosial. Pembangunan ekonomi melahirkan *platform* “kota ekonomi” dan pembangunan sosial melahirkan *platform* “kota sosial”. Menurut aliran “kota ekonomi”, urbanisasi berikuti kota dan agolemerasi harus digencarkan terus dan dikelola dengan baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kaum urbanis hingga Bank Dunia berkata begitu. Bulan Oktober 2019 lalu, tim Bank Dunia berujar bahwa “meningkatnya kesejahteraan Indonesia terkait erat dengan manfaat dari berkembangnya aglomerasi perkotaan dan peralihan ekonomi berbasis jasa dan industri. Banjir dan kemacetan Jakarta, misalnya, ditunjuk Bank Dunia sebagai masalah serius urbanisasi dan pengelolaan kota. Jika tidak dikelola dengan baik akan memunculkan kemacetan, polusi dan daerah kumuh serta buruknya infrastruktur dan pelayanan publik. Dengan kalkulasi ekonomi, Bank Dunia menunjukkan bahwa kemacetan telah merugikan negara hingga US\$ 4 miliar atau sekitar Rp 56 triliun per tahun (*Investor Daily*, 3 Oktober 2019).

Solusi kaum urbanis tidak lain adalah memperbaiki infrastruktur dan manajemen perkotaan, seperti perbaikan sarana-prasarana transportasi untuk mengatasi kemacetan, infrastruktur air untuk pengendalian banjir. Konsep infrastruktur itupun menjadi bias, yakni sebagai landasan untuk suprastruktur, yakni pembangunan ekonomi. Dengan kalimat lain pembangunan infrastruktur kota terutama digunakan untuk mendukung kepentingan ekonomi, yakni mengurangi kerugian dan meningkatkan keuntungan.

Aliran “kota sosial” banyak mengkritik aliran “kota ekonomi” yang terlalu mengejar keuntungan ekonomi tetapi mengabaikan dimensi sosial dan ekologi perkotaan. Menurut mereka kota harus ramah secara sosial dan ekologis. Kota harus inklusif untuk semuanya. Menurut aliran kota sosial, kota bukan hanya milik swasta untuk mengejar kekayaan, tetapi juga untuk anak, perempuan, orang tua, orang miskin, kaum buruh, juga untuk pendidikan, kesehatan, kenyamanan, dan lain-lain.

Di Jakarta, misalnya, hadir komunitas Rujak yang terus melakukan penelitian advokasi tentang kota sosial. Kota sebenarnya adalah civitas yang mengandung sosial. Tetapi

proses urbanisasi yang semakin menjauhkan kota dari kehidupan sosialnya. Inisiatif Kota Sosial di Jerman dimulai pada tahun 1999, “bukan sebagai program sosial, namun sebagai program investasi pengembangan perkotaan”, untuk menjawab kebutuhan untuk “mencegah lingkaran setan kemiskinan, pengabaian sosial, dan kerusakan infrastruktur”. Namun, lingkungan yang menjadi target program Kota Sosial adalah lingkungan yang masih tertinggal, seiring dengan berbagai masalah sosial dan lingkungan yang mereka hadapi. Akibatnya, solusi untuk masalah-masalah ini dirumuskan sebagai “program investasi pembangunan perkotaan”, dan bukan sebagai pendanaan sosial, meskipun memang di dalamnya terdapat komponen biaya untuk mengembangkan “pusat koordinasi” di lingkungan yang berfungsi memberikan masukan dan dukungan bagi semua yang terlibat. Selain itu, hukum yang ada mengamankan agar program tersebut mensyaratkan partisipasi warga dan manajemen lingkungan di proyek pembangunan. Kota Sosial dalam konteks ini secara spesifik merujuk kepada suatu program pembangunan perkotaan yang partisipatif. Dalam pelaksanaannya, mayoritas jenis pembangunan perkotaan yang terkait dengan Kota Sosial adalah infrastruktur perumahan dan transportasi, yang dikategorikan di dalam sektor pembangunan, sebagaimana biasa dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah (Padawangi, 2018).

Memang dua aliran itu tampak berbeda. Tetapi keduanya disatukan dengan konsep dan praktik kota berkelanjutan, yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Kota berkelanjutan memiliki tiga pilar: tiga pilar, yakni ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan ekologi lingkungan hidup (*planet*). Pembangunan kota perlu mengutamakan dan memasukkan isu pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan mitigasi bencana masuk ke rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi, rencana tata bangunan lingkungan, dan panduan rancang kota/perkotaan, serta didukung kajian lingkungan hidup strategis. Kota harus menjadi inklusif, ramah bagi semua, serta mengakomodasi semua kepentingan dan segala perbedaan. Pembangunan kota berfokus pada perencanaan kota (mitigasi

bencana, ramah lingkungan); ruang terbuka hijau (30 persen); penurunan emisi karbon melalui pengembangan transportasi massal dan nonmotor, kawasan terpadu, bangunan hijau, energi terbarukan; air bersih dan sanitasi sehat; pengolahan sampah dan limbah ramah lingkungan (Joga, 2019)

Baik kota ekonomi dan kota sosial yang dipertemukan dalam wadah kota berkelanjutan, juga dipertemukan pada solusi yang konkret, yakni pembangunan infrastruktur: transportasi massal, rumah layak huni, sabuk hijau, drainase, sanitasi, air bersih, dan masih banyak lagi. Penganut “kota ekonomi” neoliberal juga tidak kurang akal untuk menyerap konsep-resep kota berkelanjutan, dengan cara melakukan komodifikasi kata-kota kunci dalam pembangunan berkelanjutan ke dalam bisnisnya.

Bagaimanapun penganut-pendukung kota berkelanjutan hanya berpikir tentang solusi “kota centris”. Sebagai bagian dari politik urbanisme, mereka akan menuntut kebijakan dan campur tangan yang besar oleh pemerintah untuk perbaikan kota, terutama perbaikan segala infrastruktur kota, dengan alasan kota memberikan uang banyak untuk negara. Solusi “kota centris” tentu tidak akan berpikir “Indonesia centris” secara menyeluruh, sekaligus mengabaikan kemiskinan desa dan involusi pertanian sebagai akibat dari urbanisasi, juga abai terhadap arus deras migrasi penduduk dari desa ke kota. Bagi kaum urbanis, migrasi ini adalah solusi, sembari mereka akan menyentuh desa bukan dengan penguatan kabupaten-desa-agrikultur, melainkan dengan urbanisasi masuk desa atau perluasan aglomerasi perkotaan ke ranah perdesaan.

### **Solusi “Indonesia Centris” Melalui Ruralisasi**

Kaum urbanis akan terus melakukan penetrasi ke ruang perdesaan dengan formula urbanisasi, yakni perluasan aglomerasi perkotaan, baik dengan skema proyek maupun investasi sektor perumahan, industri, jasa, dan lain-lain, yang dikendalikan oleh para pemain besar dari kota. Agrikultur dan petani terus terdesak oleh arus urbanisasi itu, menjadi agribisnis besar yang dikendalikan oleh korporasi besar, seperti halnya pengalaman kebun sawit.

Jika Presiden tetap teguh pada Indonesia centris, memperkuat daerah dan desa, serta mengurangi urbanisasi, maka perhatian pada kabupaten, desa, agrikultur serta petani-nelayan, harus diutamakan. Jika solusi urban centris hanya berputar-putar menangani kota-kota besar dengan resep kota berkelanjutan, maka solusi Indonesia centris harus melihat Indonesia keluar dari kota besar, yang bertempat di kabupaten beserta desa-desanya. Kabupaten dan desa perlu kita lihat secara seksama. Karena urbanisme yang kuat dan urbanisasi yang deras, maka bila dilihat dari sisi pembangunan, kabupaten-desa pada umumnya mengalami kekurangan input, sarana-prasarana, dan output pertumbuhan. Dengan kalimat lain, kabupaten-desa tidak memperoleh kue pembangunan yang memadai. Karena itu, orang tahu, semua kabupaten di Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur, sejak Orde Baru pasti memasok penduduk perantau ke Jakarta dalam jumlah besar. Kita tidak memiliki data yang pasti, berapa besaran pasokan perantau pada setiap kabupaten di Jakarta dan sekitarnya. Namun dari kisah “mudik corona” pada awal April, dapat diketahui bahwa sudah 60an ribu pemudik pulang ke Jawa Tengah, 42 ribu di antaranya berasal dari Kabupaten Wonogiri. Di DIY, pada awal Mei 2020, tercatat 85 ribu pemudik dari Jabodetabek, sebagian besar dari Gunungkidul. Orang tahu juga bahwa perantau Gunungkidul di Jabodetabek sejak lama memiliki Ikatan Keluarga Gunungkidul, yang tentu karena jumlah perantaunya sangat besar.

Dari besaran perantau kita dapat pahami bahwa semakin banyak perantau ke kota besar berarti kondisi kabupaten-desa semakin miskin. Dengan kalimat lain, semakin miskin suatu daerah-desa, maka semakin besar arus urbanisasi ke kota. Dari sinilah, solusi “Indonesia centris” bisa dimulai, dengan membangun dan memperkuat daerah dan desa. Bagaimana caranya?

Kita bisa melakukan penelitian terhadap proyek agropolitan sebagai salah satu bentuk ruralisasi. Proyek agropolitan yang sudah berjalan lama di daerah tetap tidak bermakna besar sebagai ruralisasi, tidak menghasilkan perubahan penting seperti yang terjadi di Kabupaten Jepara. Program agropolitan yang gagal telah diteliti oleh banyak sarjana. Dengan meneliti di Kulon Progo, Bambang Trihartanto Suroyo dan

Wiwandari Handayani pembangunan kawasan agropolitan ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan perdesaan di Kabupaten Kulonprogo. Hal ini terlihat bahwa tingkat kesejahteraan petani padi, melon dan ketela pohon di kawasan ini masih dibawah rata-rata Kabupaten Kulon Progo. Faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana agribisnis hulu-hilir seperti bahan baku, alat mesin pertanian, irigasi, pemasaran dan kondisi jalan, sehingga menjadi hambatan utama bagi petani dalam peningkatan produktivitas serta daya beli petani (Suroyo & Handayani, 2014).

Studi Sinta Ningrum dan Tomi Setiawan tentang agropolitan di Cianjur mislanya, mengambil kesimpulan bahwa dampak kawasan agropolitan terhadap peningkatan kesejahteraan petani secara keseluruhan tidak signifikan. Peningkatan pendapatan petani disebabkan bukan karena pengelolaan yang tepat dari pengurus/manajemen kawasan agropolitan, namun lebih disebabkan karena kreativitas dan kerja keras petani sendiri secara individual (Ningrum & Setiawan, 2017). Dua peneliti itu juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius mengimplementasikan kebijakan agropolitan. Rencana kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan dalam jangka panjang tidak dijalankan karena terhentinya dukungan (dana, orang, alat) dari pusat. Studi Gizdy Chalifa di tempat yang sama juga menunjukkan bahwa setelah berjalan 16 tahun, kawasan agropolitan Cianjur tidak berkembang signifikan. Kendalanya yaitu benih komoditas tertentu terkadang sulit didapatkan, gangguan hama penyakit dan pencurian, penggunaan bahan kimia yang masih tinggi, kurangnya pengetahuan petani akan pengolahan produk yang tidak sesuai permintaan (*reject*), fasilitas *packing house* yang terlalu jauh, pasar produk olahan yang sedikit, kurangnya pertemuan antar *stakeholder* kawasan agropolitan, petani belum mengerti sistem kawasan agropolitan, kurangnya *monitoring* dan evaluasi dari pemerintah, sarana dan prasarana yang rusak (Chalifa, Gizdy; Syamsiah, 2019)

Kesimpulan serupa juga dihasilkan oleh Baiq Diana Amalia Murty dan kawan-kawan yang telah meneliti program agropolitan Kecamatan Sembalun Lombok

Timur. *Masterplan* agropolitan sudah disiapkan, tetapi pengembangan kawasan belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dengan baik yang disebabkan kurangnya sosialisasi program sehingga menyebabkan sikap resisten petani terhadap beberapa program pengembangan, tidak dilibatkannya petani dalam perumusan program sehingga petani kurang memiliki komitmen dalam melaksanakan program pengembangan (Diana, Murty, & Domai, 2016).

Penelitian Isnaeni Agustina (2017) juga menunjukkan bahwa pengembangan agropolitan Ciwidey Kabupaten Bandung membuahkan hasil positif dan negatiff. Demikian pendapatnya:

“Hasil evaluasi untuk karakteristik fisik menunjukkan bahwa hasil pembangunan fisik Kawasan Ciwidey berdampak pada kemudahan transportasi dan pengiriman hasil pertanian, peningkatan hasil produksi pertanian, dan mampu memberi branding produk olahan pertanian sebagai oleh-oleh khas Kawasan Agropolitan Ciwidey. Untuk karakteristik sosial, pengembangan kawasan agropolitan Ciwidey berdampak pada peningkatan hasil pertanian karena terdapat penguatan kelembagaan petani melalui manajemen partisipatif. Namun, untuk karakteristik ekonomi, pengembangan agropolitan berdampak pada penurunan hasil produksi sawah karena ada petani yang beralih dalam komoditas yang ditanam sejalan dengan adanya perluasan kemitraan dengan pengusaha retail. Jika dibiarkan, hal ini akan memberikan dampak negatif dan mengancam ketahanan pangan kawasan agropolitan Ciwidey sehingga perlu ada intervensi dari pemerintah, organisasi agribisnis, koperasi atau lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan pemahaman bagi para petani mengenai agropolitan yang berkelanjutan.” (Agustina & Artiningsih, 2017)

Penulis tidak bermaksud melakukan generalisasi atas sejumlah penelitian tentang agropolitan di atas, tetapi penulis bermaksud melakukan interpretasi kritis terhadap agropolitan dengan menggunakan hasil penelitian mereka. Jika program agropolitan di sejumlah tempat tidak berhasil secara gemilang, tentu kejadian yang sama juga bisa terjadi di tempat-tempat lain, karena pendekatan program yang seragam untuk seluruh tempat. Karena itu penulis berpendapat bahwa konsep agropolitan bisa

ditinggalkan dulu. Pengalaman Jepara dan daerah lain yang relevan bisa dipelajari untuk dasar dan model ruralisasi di banyak kabupaten dan desa di Indonesia. Korporasi rakyat di sektor agrikultur yang dikonsolidasikan oleh desa bisa menjadi kekuatan pertama. Kekuatan kedua adalah kaum borjuis lokal yang menggerakkan industrialisasi pertanian dan perdesaan. Kekuatan ketiga bisa borjuis nasional yang perlu dikemas dengan pola shareholding dengan kabupaten, borjuis lokal, desa, maupun korporasi rakyat. Jika kaum borjuis tidak hadir, maka pemerintah kabupaten bisa menghadirkan perusahaan daerah untuk menggerakkan industrialisasi perdesaan dan pertanian. Pemerintah pusat memberikan dukungan kapasitas, regulasi, infrastruktur dan pendanaan, yang melampauai pendekatan proyek dari atas.

Melampauai agropolitan, kita bisa belajar dari kisah Kabupaten Jepara, pantai utara Jawa Tengah, yang memiliki tradisi ekonomi-politik lokal sangat kuat dan mandiri sejak lama. Bukan berarti bahwa Jepara tidak memasok perantau ke Semarang maupun Jabodetabek, namun industri mebel (kecil, sedang dan besar) yang kondang, membuat kemakmuran lokal Jepara lebih baik dari kabupaten-kabupaten lain. Pada tahun 1971 Jepara adalah salah satu kabupaten termiskin di Jawa Tengah, tetapi di era reformasi, sudah dekat dengan pendapatan per kapita regional (Schiller, 1996, 2007). Penelitian tahun 2007 menunjukkan, sebanyak 15.271 unit produksi telah diidentifikasi di Jepara, yang memperkerjakan sekitar 170.000 orang. Kegiatan tersebut menghasilkan pendapatan yang cukup besar, yaitu nilai tambah antara Rp 11.900 - 12.300 miliar/tahun (sekitar Euro 1 miliar/tahun), atau Rp 70 - 78 juta/pekerja/tahun. Konsumsi kayu bulat di Kabupaten Jepara adalah sebesar 1,5 hingga 2,2 juta m<sup>3</sup>/tahun, dengan kata lain, 9 m<sup>3</sup> kayu bulat dapat menyokong pekerjaan 1 pekerja tetap selama satu tahun (Jean-Marc Roda, dkk. 2007). Industri mebel tentu tidak sendirian, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor lain, baik pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Ekonomi lokal yang hidup-dinamis itu tentu menambah lapangan pekerjaan, sekaligus menekan urbanisasi dan kemiskinan Jepara. Data tahun 2019, menunjukkan bahwa Jepara memiliki angka kemiskinan terendah keempat dari 35 kabupaten/kota di Jawa

Tengah, yakni 6,6%, setelah Kota Semarang (3,98%), Kota Salatiga (4,76%) dan Kota Pekalongan (6,66%). Dengan demikian, Jepara memiliki kemakmuran tertinggi dan kemiskinan terendah di antara kabupaten-kabupaten lain di Jawa Tengah. Satu strip di bawah Jepara adalah Kabupaten Kudus yang dikenal dengan “kota kretek”, kemudian Kabupaten Semarang, Kabupaten Sukoharjo, dan seterusnya.

Secara sosiologis, masyarakat Jepara sangat berakar pada pedesaan Jawa, dengan ikatan sosial yang kuat antara pengusaha di kota dan petani di desa atau produsen kayu dari berbagai hutan rakyat (Roda, et.al, 2007) Struktur sosial semacam ini bisa mengurangi eksploitasi pengusaha lokal terhadap petani di desa. Kondisi ekonomi yang hidup, kuat dan mandiri Jepara juga diperkuat dan masyarakat yang dapat membatasi negara dan membuat pemerintah negara lokal menjadi lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat lokal (Schiller, 1996, 2007).

Dari sudut ekonomi, Jepara memberi pelajaran tentang industrialisasi dan kewirausahaan lokal. Ini adalah ekonomi riil, berbasis pada produksi lokal, bukan sekadar produksi subsisten seperti petani dan kerajinan berskala kecil seperti di Bantul. Ekonomi produktif lokal ini bukan hanya dekat dengan rakyat, tetapi juga lebih kuat ketimbang ekonomi konsumtif maupun ekonomi kreatif yang berpusat di sektor pariwisata. Di masa pandemi corona, ekonomi kreatif di sektor pariwisata mengalami kelumpuhan total, sedangkan ekonomi produktif lokal masih tetap bertahan kuat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Artikel ini mengambil kesimpulan singkat bahwa urbanisasi yang berkembang sangat kokoh menjadi urbanisme mengandung paradoks dan kontradiksi: pembusukan kota di balik kekayaan dan kemegahan, sekaligus juga pemiskinan desa. Karena desa miskin maka terjadi arus migrasi penduduk ke kota, yang semakin memperparah pembusukan kota.

Atas dasar kesimpulan itu, artikel ini mengakhiri dengan saran, bahwa untuk kepentingan Indonesia sentris yang lebih merata, adil dan makmur, maka urbanisasi harus digeser menjadi ruralisasi. Ruralisasi

bukan berarti perluasan aglomerasi perkotaan ke ranah desa, bukan pula proyek-proyek dari atas seperti proyek agropolitan, tetapi dalam bentuk industrialisasi pedesaan yang berbasis pada emansipasi lokal. Pemerintah kabupaten, borjuis lokal, desa, dan petani menjadi pemain penting dan utama dalam emansipasi itu. Pengalaman Jepara sebagai kabupaten paling makmur di Jawa Tengah bisa menjadi contoh ruralisasi yang melampaui pendekatan proyek dari atas. Penulis juga merekomendasikan kepada ilmuwan tentang pentingnya penelitian empirik yang mendalam tentang ruralisasi seperti kisah Jepara, yang bisa ditempuh dengan studi komparatif dengan daerah-daerah lain, sehingga pengetahuan ruralisasi dari sudut lokal bisa menjadi lebih kaya, sekaligus berguna untuk rekomendasi kebijakan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I., & Artiningsih, A. (2017). "Evaluasi Implementasi Masterplan Kawasan Agropolitan Ciwidey Menggunakan Logic Models". *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.14710/jwl.5.1.1-10>
- Anderson, K. (2011). Marx at the Margins: On Nationalism, Ethnicity, and Non-Western Societies By Kevin B. Anderson. *Global Discourse*, 2(2), 174–182. <https://doi.org/10.1080/23269995.2011.10707921>
- Ban, C. (2020). Beyond Social Science Naturalism: The Case for Ecumenical Interpretivism. *Critical Review*. <https://doi.org/10.1080/08913811.2020.1729482>
- Bevir, M., & Blakely, J. (2018). Why Political Science Is an Ethical Issue. *Political Studies*, 66(2), 425–441. <https://doi.org/10.1177/0032321717723503>
- Bevir, M., & Blakely, J. (2020). Naturalism and its Inadvertent Defenders. *Critical Review*, 1–13. <https://doi.org/10.1080/08913811.2019.1730592>
- Brenner, N. (2014). *Implosions/Explosions: Towards a Study of Planetary Urbanization*. Berlin: Jovis Verlag

- GmbH.
- Chalifa, Gizdy; Syamsiah, N. (2019). Identifikasi Kendala Pengelolaan Kawasan Agropolitan Kabupaten Cianjur. *Agroinfo Galuh*, 6, No. 1.
- Chigbu, U. E. (2015). Ruralisation: a tool for rural transformation. *Development in Practice*, 25(7), 1067–1073. <https://doi.org/10.1080/09614524.2015.1071783>
- Childe, V. Gordon. (1950). "The Urban Revolution". *The Town Planning Review* Vol. 21, No. 1.
- Diana, B., Murty, A., & Domai, T. (2016). "Implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Sembalun Kabupaten Lombok Timur" *J-PAL*. 7:2
- Elnagi, M., Hassan, E., Pitoyo, A. J., & Mada, U. G. (2017). "Urbanization and Economic Development in Indonesia". *Populasi*, 25.
- Firman, T. (2004). New town development in Jakarta Metropolitan Region: a perspective of spatial segregation. *Habitat International*, 28(3), 349–368. [https://doi.org/10.1016/S0197-3975\(03\)00037-7](https://doi.org/10.1016/S0197-3975(03)00037-7)
- Friedmann, J. (1985). Political and technical moments in development: agropolitan development revisited. *Environment and Planning D: Society and Space*, 3(2), 155–167. <https://doi.org/10.1068/d030155>
- Friedmann, John, & Douglass, M. (1975). *Agropolitan Development: Towards A New Strategy for Regional Planning in Asia*. Los Angeles, Ca: School of Architecture and Planning, University of California Los Angeles.
- Geertz, C. (1963). *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Hardiansah, E. (2015). Pengantar Edisi Khusus 55 Tahun Pendidikan Planologi: Pembangunan Kota Inklusif di Era Desentralisasi. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 26(1), 1–6. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2015.26.1.1>
- Harvey, D. (1985). *The Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization*. Oxford, UK: Blackwell.
- Joga, N. (2019). Mengelola Urbanisasi Berkelanjutan. *Investor Daily*. Diambil dari <https://investor.id/opinion/mengelola-urbanisasi-berkelanjutan>
- Krause, M. (2013). The Ruralization of the World. *Public Culture*, 25(2 70), 233–248. <https://doi.org/10.1215/08992363-2020575>
- Lefebvre, H. (2003). *The Urban Revolution*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Lewis, B. D. (2014). Urbanization and Economic Growth in Indonesia: Good News, Bad News and (Possible) Local Government Mitigation. *Regional Studies*, January.
- Lipton, M. (1977). *Why Poor People Stay Poor: Urban Bias in World Development*. London: Temple Smith.
- Mahi, A. H. (2007). *Agropolitan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Midgley, J. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London-Thousand Oaks-New Delhi: Sage.
- Nguyen, H. M., & Nguyen, L. D. (2018). The relationship between urbanization and economic growth. *International Journal of Social Economics*, 45(2), 316–339. <https://doi.org/10.1108/ijse-12-2016-0358>
- Ningrum, S., & Setiawan, T. (2017). Quo Vadis Kebijakan Agropolitan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, Vol. 1(No. 1).
- Padawangi, R. (2018). *Kota Sosial: Aspirasi Transformasi Perkotaan di Asia*. Jakarta: RUJAK dan FES.
- Plant, R. (2010). *The Neo-liberal State*. London: Oxford University Press.
- Raveesh, S. (2014). Ruralisation: A Step Towards Balanced Growth. *Asian Journal of Multidisciplinary Studies*, 2(1), 37–44.
- Roda, J.-M. et. a. (2007). *Atlas Industri Mebel Kayu di Jepara Indonesia*. Bogor: Center for International Forestry Research.

- Rustandi, E., & Pranoto, S. (2007). *Agropolitan: Membangun Ekonomi Perdesaan*. Bogor: Crestpent.
- Schiller, J. (1996). *Developing Jepara: State and Society in New Order Indonesia*. Clayton, Victoria: Center of Southeast Asian Studies, Monash University.
- Schiller, J. (2007). Masyarakat Sipil di Jepara: Mudah Terpecah Tapi Inklusif. In H. S. Nordholt & G. van Klinken (Ed.), *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Scott, J. (1976). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. Yale: Yale University Press.
- Smith, D. N. (2013). Marx at the Margins: On Nationalism, Ethnicity, and Non-Western Societies, by Kevin B. Anderson. Chicago: University of Chicago Press, 2010. *Rethinking Marxism*, 25(1), 130–134. <https://doi.org/10.1080/08935696.2012.711107>
- Sumawinata, S. (2004). *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Gramedia.
- Suroyo, B. T., & Handayani, W. (2014). Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 25, No. 3.
- Tichelman, F. (1980). *The Social Evolution Of Indonesia: The Asiatic Mode Of Production And Its Legacy*. The Hague: Martinus.
- Tilly, C. (Ed.). (1975). *The Formation of National State in Western Europe*. Princeton: Princeton University Press.
- United Nations. (2006). *World Urbanization Prospects: The 2005 Revision Population Database* (UN, ed.). New York.
- Wedeen, L. (2020). Anti-Naturalism and Structure in Interpretive Social Science. *Critical Review*, 1–8.
- Wilbur, A. (2013). "Growing a Radical Ruralism: Back-to-the-Land as Practice and Ideal". *Geography Compass*, 7:2.
- Woods, M. (2011), *Rural*, London: Routledge.
- Yglesias, M. (2012, Maret 19). *The Mixed-Up Politics of Urbanism*
- (<https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/10/03/indonesia-bold-reforms-needed-to-realize-urban-potential>)